

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu masalah fundamental yang menjadi sorotan di semua negara. Masalah tersebut dialami baik di negara berkembang maupun maju.² Negara-negara miskin dihadapkan dengan masalah pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tingkat kemiskinan yang mempunyai jumlah atau presentase tinggi nantinya akan menghambat jalannya pembangunan ekonomi suatu negara.³ Kemiskinan terjadi disebabkan karena kemampuan dari setiap pelaku ekonomi itu tidak sama, sehingga timbul adanya masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan maupun menikmati hasil dari pembangunan tersebut.⁴ Menurut Auliyah, Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang cenderung menyebar atau *multiplier effect* terhadap kehidupan masyarakat. Dimana kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat tidak

² Saddam Tubaka, *Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol.7 No.1, 2019, hal.113

³ Moh. Arif Novriansyah, *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Gorontalo Development Review, Vol.1 No.1, 2018, hal.61

⁴ Frederic W.Nalle dan Emilla K.Niha, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara*, Jurnal Dhinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1, 2018, hal.34

dapat terpenuhi, sehingga persoalan tersebut perlu diselesaikan dan dicegah.⁵ Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat memahami pentingnya masalah ini dan berupaya semaksimal mungkin guna menekan laju kemiskinan.

Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu atau sedang berada dalam lingkup kemiskinan. Hal tersebut diupayakan agar masyarakat tersebut menjadi hidup dengan layak dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga masyarakat miskin bisa mewujudkan fungsi sosialnya dengan baik. Upaya tersebut perlu dilakukan disebabkan karena apabila fungsi sosialnya berjalan dengan baik tentunya juga akan menaikkan kesejahteraan hidupnya maupun keluarganya. Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan ekonomi atau kegagalan dalam memenuhi hak dasarnya seperti kebutuhan dalam hal pangan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga mengalami perbedaan perlakuan seperti dikucilkan, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk turut berpartisipasi dalam masyarakat.⁶

Berdasarkan perspektif Islam kemiskinan merupakan suatu masalah yang dapat menimbulkan bahaya diantaranya dapat membahayakan aqidah atau iman, akhlak atau moral, kelogisan dalam berfikir atau akal, keluarga serta masyarakat. Dalam Islam hal tersebut dianggap sebagai suatu musibah

⁵ Syahril dan Thazilla, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol.2 No.1, 2022, hal.59

⁶ Pandu Baniadi dan Mustofa, *Kemiskinan Multidimensi*, Jurnal Ekonomi dan pendidikan, Vol.15 No.1, 2018, hal. 13-15

yang sangat serius dan harus segera diatasi.⁷ Dalam mengatasi kemiskinan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja keras atau berusaha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:⁸

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “...*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri...*”

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya agar senantiasa bekerja keras atau berusaha untuk merubah suatu nasib atau keadaan. Apabila mereka tidak mau berusaha merubah keadaannya dengan bekerja keras atau usaha, maka Allah SWT tidak akan merubah keadaan tersebut. Pemerintah memiliki tanggungjawab atas kehidupan seluruh rakyatnya, yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk bersama. Pemerintah telah melakukan segala upaya guna membantu mengatasi kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat beberapa kebijakan.

Salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa adanya Program Keluarga Harapan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Negara Indonesia.

⁷ Akmal, Zaki Fuad dan Nur Baety Sofyan, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol.2 No.2, 2018, hal.5

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy .Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal.346

Sebagaimana dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Presentase Penduduk Miskin
2021	27,54	10,14
2021	26,50	9,71
2022	26,16	9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan paparan tabel di atas bahwa presentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun sebesar 0,60% terhadap Maret 2021. Disamping itu, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik presentase penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan pada tahap I Maret 2022 sebesar 97,2% meningkat dibandingkan dengan September 2021 dimana sebesar 96,7%.⁹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan yang ada di Negara Indonesia secara umum telah mengalami penurunan dan adanya kebijakan pemerintah berupa bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan cukup berperan efektif dalam upaya mengatasi kemiskinan. Menurunnya jumlah kemiskinaan akan memberikan gambaran bahwa terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat.

Pemerintah Indonesia mulai meluncurkan Program Keluarga Harapan tepatnya pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan atau biasa disebut

⁹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*, (Berita Resmi Statistik, 2022), hal.3

PKH merupakan program perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu atau miskin yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan DTKS, serta memiliki komponen persyaratan sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Peserta Program Keluarga Harapan dinamakan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.¹⁰ Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial bersyarat yang termasuk dalam kategori klatser I. Program seperti itu biasa dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat di dunia internasional dan terbukti cukup berhasil dalam menghadapi masalah kemiskinan yang terdapat pada negara-negara tersebut.

Adapun persyaratan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi kriteria atau komponen yang sudah ditetapkan. Kriteria atau komponen tersebut diantaranya terdiri dari ibu yang hamil atau nifas maupun menyusui, kemudian anak usia dini yang memiliki usia 0-6 tahun, anak usia sekolah yang belum menyelesaikan wajib belajarnya (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat), penyandang disabilitas berat yang tidak dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa bantuan orang lain serta lansia. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu guna meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan,

¹⁰ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024*, (Jakarta: Kemensos RI, 2021), hal.18

menciptakan perubahan tingkah laku dan kemandirian serta mengurangi kemiskinan.¹¹

Selain itu, Program Keluarga Harapan juga memiliki beberapa kewajiban dan hak. Adapun kewajiban tersebut harus dipenuhi misalnya seperti memeriksakan kesehatan secara rutin, mendaftarkan juga memastikan kehadiran anggota keluarga penerima Program Keluarga Harapan ke satuan pendidikan sesuai jenjang yang ditempuh, dan keluarga lanjut usia wajib mengikuti penyuluhan. Selain itu Keluarga Penerima Manfaat juga diwajibkan untuk turut datang mengikuti pertemuan rutin yang diadakan secara bergilir dari rumah ke rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pertemuan tersebut disebut dengan *Family Development Session* atau P2K2.¹² Dimana memiliki tujuan untuk merubah pola pikir dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat yakni meningkatkan pengetahuan terkait pendidikan untuk mendorong anak agar bersemangat sekolah serta terkait pola asuh anak. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dalam keluarga seperti pengalokasian uang guna kebutuhan. Kemudian juga untuk meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya kesehatan. Serta memberi pengarahan dan pengingat kepada keluarga lanjut usia dan disabilitas terkait kewajiban dan hak sekaligus pemanfaatan bantuan.

Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yakni dalam jangka pendeknya dapat membantu mengurangi beban

¹¹ *Ibid*, hal.22-23

¹² *Ibid*, hal.24

pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan, dalam jangka menengahnya dapat memberikan pelayanan, jangka panjangnya diharapkan mampu membuat masyarakat miskin terlepas dari lingkup kemiskinan. Melalui program tersebut pemerintah berupaya dalam mengatasi kemiskinan dengan harapan bisa membantu perekonomian Keluarga Penerima Manfaat dimana notabennya merupakan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya atau miskin, sehingga dengan adanya program tersebut masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera.

Hubungannya yakni Program Keluarga Harapan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pada dasarnya merupakan suatu bentuk usaha untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau rentan dalam hal meningkatkan harkat serta martabatnya. Agama Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi dan Islam akan mengarahkan pada tercapainya kesejahteraan. Pada perspektif ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya untuk dicapai di dunia melainkan juga di akhirat kelak.¹³ Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu melalui pendidikan, kesehatan, dan memperbaiki perekonomian. Hal tersebut merujuk pada syariat Islam yaitu *maqashid syariah*. Al-Ghazali mengemukakan *maqashid syariah* atau syariat Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴

¹³ Didi Suardi, *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol.6 No.2, 2021, hal.330

¹⁴ *Ibid*, hal.330

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang menerapkan Program Keluarga Harapan. Program tersebut mulai diterapkan di Kota Tulungagung pada tahun 2007. Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol termasuk salah satunya. Desa Podorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbergempol yang sejak tahun 2007 sudah terdapat penerima Program Keluarga Harapan. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan pada saat itu di Kecamatan Sumbergempol sebanyak 5 Keluarga Penerima Manfaat. Hingga akhir tahun 2022 jumlah penerima di Desa Podorejo mengalami perkembangan menjadi kurang lebih sebanyak 151 Keluarga Penerima Manfaat.¹⁵ Berikut adalah kurang lebih rincian data jumlah penerima Program Keluarga Harapan atau Keluarga Penerima Manfaat di Desa Podorejo selama tahun 2022:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Desa Podorejo Tahun 2022

Periode (Triwulan)	Perkembangan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat/KPM
I	170
II	164
III	157
IV	151
Total	151

Sumber: Data Pendamping PKH

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Udin selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Podorejo pada tanggal 14 Januari 2023

Program Keluarga Harapan di Desa Podorejo memberikan dampak yang positif kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dengan adanya program tersebut masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera.

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat guna mencapai tujuan kebijakan dalam rangka mengatasi kemiskinan guna meraih kesejahteraan. Masyarakat dituntut untuk menggunakan akses yang diberikan guna memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan memeriksakan kesehatan secara rutin, mendaftarkan juga memastikan kehadiran anggota keluarga ke satuan pendidikan sesuai jenjangnya, Keluarga Penerima Manfaat juga diwajibkan untuk turut datang mengikuti pertemuan rutin yang disebut dengan *Family Development Session* atau P2K2 untuk merubah pola pikir terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan serta dalam hal ekonomi.¹⁶ Namun realitanya di beberapa daerah setelah bantuan didapatkan belum semua Keluarga Penerima Manfaat dapat melaksanakannya.

Adanya perkembangan jumlah penerima atau Keluarga Penerima Manfaat dan lamanya program dilaksanakan di Desa Podorejo menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana keberhasilan Program Keluarga Harapan hingga bantuan tersebut diterima masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Podorejo. Bantuan dari program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan merubah perilaku masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat

¹⁶ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024*, (Jakarta: Kemensos RI, 2021), hal.22-23

penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keberhasilan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Podorejo Tulungagung”. Beberapa fokus penelitian diperoleh dari *pra-indepth interview* kemudian dikembangkan dari tujuan Program Keluarga Harapan dalam Permensos RI No.1 tahun 2018. Fokus penelitian tersebut sebagai indikator yang digunakan untuk memotret keberhasilan dari Program Keluarga Harapan sebagai subjek mayor dalam penelitian. Adapun diantaranya yaitu, dapat dilihat dari aspek pendidikan yang dipotret dari indikator akses pendidikan dan sadar pendidikan. Kemudian aspek kesehatan yang dipotret dari indikator akses kesehatan dan sadar kesehatan serta aspek ekonomi yang dipotret dari indikator beban pengeluaran dan pendapatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat beberapa fokus masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek pendidikan pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung?

2. Bagaimana aspek kesehatan pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung?
3. Bagaimana aspek ekonomi pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan aspek pendidikan pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung.
2. Mendeskripsikan aspek kesehatan pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung.
3. Mendeskripsikan aspek ekonomi pada Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan membahas mengenai identifikasi cakupan yang muncul dalam penelitian supaya pembahasannya sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai. Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan masalah menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya maka peneliti memberikan batasan masalah ini, yakni hanya membahas terkait keberhasilan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam pada masyarakat Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Narasumber yang digali informasinya adalah pendamping Program Keluarga Harapan Desa Podorejo, peserta Program Keluarga Harapan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Podorejo, Perangkat Desa Podorejo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan bagi pembaca mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang membahas terkait keberhasilan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Peneliti

Berguna sebagai salah satu bahan evaluasi dan optimalisasi dalam melakukan perencanaan, penataan, dan pengambilan kebijakan terkait dengan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat bertujuan sebagai pengentasan masalah kemiskinan.

b. Bagi Masyarakat

Berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwa Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan, dan pendidikan.

c. Bagi Akademik

Menambah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan harapan bermanfaat bagi para pembacanya.

d. Bagi Peneliti Kemudian

Berguna sebagai bahan referensi dan masukan bagi para peneliti yang akan datang guna melakukan penelitian.

F. Penegasan Istilah

1. Definisni Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan judul “Keberhasilan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Podorejo Tulungagung” adalah sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian

bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu atau miskin yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disebut dengan DTKS, serta memiliki komponen persyaratan sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Peserta Program Keluarga Harapan disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁷

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana seseorang dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengembangkan dirinya secara layak, sehingga dapat memenuhi kewajiban sosialnya.¹⁸

c. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif memiliki arti sudut pandang. Sedangkan ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku ekonomi manusia, dimana tingkah lakunya diatur berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam dan Tauhid.¹⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perspektif ekonomi Islam merupakan sudut pandang ekonomi yang didasarkan pada aturan Islam.

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini akan mengkaji tentang keberhasilan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan

¹⁷ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021-2024*, (Jakarta: Kemensos RI, 2021), hal.18

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁹ Azharsyah Ibrahim, et.al, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), hal.56

kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Adapun maksudnya yaitu Program Keluarga Harapan merupakan Program pemberian bantuan bersyarat diperuntukkan kepada masyarakat yang terdapat pada Data Kesejahteraan Terpadu Sosial (DTKS). Dimana pada tujuan akhir sebenarnya atau target dari program tersebut adalah adalah kesejahteraan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan pada penelitian ini dilihat dari capaian tujuan Program Keluarga Harapan. Indikator keberhasilan yang digunakan merupakan turunan dari tujuan Program Keluarga Harapan menurut Permensos RI No.1 tahun 2018. Diantaranya kemudahan akses pendidikan dan sadar pendidikan, kemudahan akses kesehatan dan sadar kesehatan, serta berkurangnya beban pengeluaran dan bertambahnya pendapatan. Adanya program tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam aktivitas ekonomi didasarkan pada syariat Islam dan memiliki tujuan sebagaimana tujuan syariat Islam yakni mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan yang tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Dengan demikian penelitian ini membahas terkait keberhasilan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan yang kemudian disorot dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul "Keberhasilan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Desa Podorejo Tulungagung" akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan terkait kajian kepustakaan berupa landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian dan permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang uraian paparan data yang disajikan dengan topik berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data didapatkan melalui pengamatan sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan, dan juga deskripsi informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi terkait analisis dengan cara melakukan konfirmasi antara temuan penelitian dengan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian akhir dalam skripsi yakni memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran guna melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang telah dilaksanakan.